



TRIBUN JOGJA/CHRISTI MASYKMA WAHIDHANI  
**PODCAST** - Komisioner Bawaslu Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati (tengah) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki (kanan) dalam podcast diemansi korten positif Diaspora bertajuk "Awasi Hakmu: Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024", Selasa (9/7).

## Awasi Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024

**KOTA YOGYA, TRIBUN** - Proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta masih berlangsung. Untuk itu, warga Kota Yogyakarta diajak untuk ikut mengawasi proses pemutakhiran data pemilih yang saat ini tengah berlangsung. Tujuannya, untuk melindungi hak pilih masyarakat di Kota Yogyakarta.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Yogyakarta, Siti Nurhayati mengatakan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya saat menyerahkan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) saja, tetapi juga mengawasi ketika tahapan Pilkada dari awal sampai akhir. Termasuk, pada tahapan pemutakhiran data pemilih.

"Pemutakhiran data pemilih menjadi tahapan paling krusial dan paling panjang. Karena tidak hanya mencocokkan dan merevisi data kependudukan pemilih, tapi ada penyusunan, penetapan DPS (Daftar Pemilih Sementara), DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran), dan DPT (Daftar Pemilih Tetap)", kata Siti, Selasa (9/7).

"Maka dari itu, masyarakat harus ikut mengawal dari awal sampai akhir. Pemutakhiran data harus diawasi juga, supaya hak pilihnya tidak terlewatkan, memastikan keluarganya yang sudah punya hak pilih tercatat sebagai DPT. Kita bersama-sama harus mengawal Pilkada," sambungnya.

Dalam proses pemutakhiran data ini, Bawaslu Kota Yogyakarta juga ikut mengawasi pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh panitia pemutakhiran data pemilih (Pantariih) bentuk KPU Kota Yogyakarta. Ada dua metode pengawasan yang dilakukan yaitu pengawasan melekat dan uji petik.

Pengawasan melekat dilakukan dengan cara melekat dengan petugas Pantariih untuk memastikan petugas melakukan tugas sesuai ketentuan. "Pantariih harus ketemu orangnya, minimal berteriak kepada keluarga. Dari pengawasannya kami, sebagian besar melakukan tugas sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur). Sementara yang belum, kami berikan saran perbaikan," terangnya.

Sementara pengawasan dengan metode

uji petik dilakukan dengan mengambil sampel per kelurahan di Kota Yogyakarta yang sudah selesai coklit. Agar pengawasannya optimal, maka pihaknya bersinergi dengan stakeholder terkait. Mulai dari dinas sosial, bagian tata pemerintahan, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, TNI/Polri, dan lain-lain.

"Petugas pantariih bekerja mulai 24 Juni sampai 24 Juli. Di Kota Yogyakarta, coklit sudah 70 persen. Karena memang target KPU Kota Yogyakarta tiga minggu selesai (coklit). Tentu ini berjalan karena koordinasi yang baik dan dukungan dari seluruh pihak, termasuk jajaran kelurahan, kemantren, hingga Kota Yogyakarta," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta, Septi Sri Rejeki mendorong masyarakat Kota Yogyakarta untuk sadar administrasi kependudukan (adminduk). Menurut dia, kesadaran masyarakat terkait adminduk juga mempengaruhi proses pemutakhiran data pemilih.

"Kadang kematian tidak dilaporkan oleh warga, sehingga tidak memiliki akta kematian. Padahal Pantariih tidak bisa mencoreti begitu saja, harus dibuktikan dengan dokumen kependudukan. Masyarakat mungkin tidak menyadari, kalau administrasi kependudukan ternyata berkaitan dengan Pilkada. Sehingga kami mengajak masyarakat untuk sadar adminduk," ungkapnya.

Pihaknya pun siap mensukseskan Pilkada yang digelar 27 November. Selain melakukan jemput bola untuk pemilih pemula hingga ke sekolah-sekolah, pihaknya juga membuka posko di kantor Disdukcapil Kota Yogyakarta. Tujuannya untuk memastikan warga Kota Yogyakarta mendapatkan KTP elektronik untuk keperluan Pilkada.

"Agar tidak ada masyarakat yang terkendala untuk memilih. Kami buka posko pada saat hari H. Bagi pemilih pemula, kami jemput bola. Yang berusia 16 tahun boleh melakukan perekaman, tetapi untuk pencetakan tetap saat usianya 17 tahun. Kalau umurnya 17 tahun pas Pilkada, silahkan datang ke Disdukcapil untuk ambil KTP, kemudian bisa ke TPS," terangnya. (mau/ord)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005